

**PENGARUH INFRASTRUKTUR, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas  
Negeri Padang*



**OLEH :**

**LUSI DEFIANTI  
2013/1303634**

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2020**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

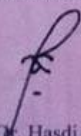
PENGARUH INFRASTRUKTUR, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
DAN KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Nama : Lusi Defianti  
TM/NIM : 2013/1303624  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 22 Maret 2022

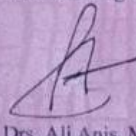
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si  
NIP. 19550505 197903 1 010

Pembimbing II



Drs. Ali Anis, MS  
NIP. 19591129 198602 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

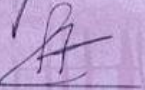
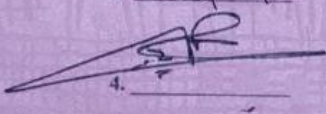
*Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan  
Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*

### **PENGARUH INFRASTRUKTUR, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA**

Nama : Lusi Defianti  
BP/NIM : 2013/1303634  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Publik  
Fakultas : Ekonomi

Padang, 22 Maret 2022

#### **Tim Penguji**

|               | Nama                          | Tanda Tangan                                                                             |
|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua      | : Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si | 1.  |
| 2. Sekretaris | : Drs. Ali Anis, MS           | 2.  |
| 3. Anggota    | : Ariusni, SE, M.Si           | 3.  |
| 4. Anggota    | : Drs. Zul Azhar, M.Si        | 4.   |

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lusi Defianti  
NIM/Tahun Masuk : 1303634/2013  
Tempat/Tgl. Lahir : Kp. Lambah/12 Desember 1995  
Jurusan : Ilmu Ekonomi  
Keahlian : Ekonomi Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jalan Enggang 3 No 8  
No. HP/Telepon : 083121742609  
Judul Skripsi : Pengaruh Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 04 November 2020

Yang menyatakan,



Lusi Defianti  
NIM: 1303634

## ABSTRAK

**Lusi Defianti 2013/1303634: Pengaruh Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, dengan dosen pembimbing I bapak Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si dan pembimbing II bapak Drs. Alianis, MS.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh infrastruktur dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (2) indeks pembangunan manusia dan korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat (3) pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dan induktif. Jenis data adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu 33 Provinsi yang ada di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan *Indirect Least Square* (ILS). Analisis induktif dalam penelitian ini mencakup: (1) Uji Pemilihan Model (2) Uji Asumsi Klasik (3) Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Uji t dan Uji F. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari situs *Badan Pusat Statistik* dan *Laporan Tahunan KPK* tahun 2014-2018, serta analisis dalam penelitian menggunakan *Eviews 10*.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Infrastruktur jalan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (2) Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (3) Secara bersama-sama infrastruktur jalan dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (4) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia (5) Korupsi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia (6) Secara bersama-sama indeks pembangunan manusia dan korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia (7) Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dengan demikian penulis menyarankan kepada Pemerintah Negara untuk memberikan perhatian lebih terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, khususnya peningkatan infrastruktur yang merata, meningkatkan indeks pembangunan manusia, dan permasalahan korupsi di Indonesia, sehingga hal ini akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci: Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia, Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tentang **“Pengaruh Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia dan Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”**. Salawat beriring salam buat junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan perubahan kepada umat manusia untuk menjadi manusia yang berilmu, pengetahuan dan berakhlakul karimah.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan berkat bantuan dari dosen pembimbing dan semua pihak, akhirnya skripsi ini terwujud, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua terkasih Zulfa (papa) dan Lisna Wati (mama), dan kakak dan adek ku (riki rian Saputra, lisa safitri) love u all, dan juga kepada:

1....Dekan Fakultas Ekonomi Bapak Dr. Idris, M.Si

2....Melti Roza Adry, SE.ME selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan juga  
Dewi Zaini Putri, SE.MM selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi.

3....Prof. Dr. Hasdi Aimon, M.Si sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan, bantuan serta bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.

- 4....Drs. Alianis, MS sebagai pembimbing II dan juga sebagai Penasehat Akademis yang telah memberikan dorongan, informasi, petunjuk dan arahan serta bimbingan dalam skripsi ini.
- 5....Ariusni, SE. M.Si selaku dosen penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi sempurnanya skripsi ini.
- 6....Drs. Zul Azhar, M.Si selaku dosen penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi sempurnanya skripsi ini.
- 7....Staf pengajar dan administrasi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu dalam memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
- 8....Semua teman-teman keluarga besar Ilmu Ekonomi 2013. Terimakasih atas motivasi dan dukungannya.

Semoga selama bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah, kebaikan dan dibalas dengan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Amin. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak guna kesempurnaan dimasa akan datang, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umum.

Padang, Oktober 2020

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                             |            |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                        | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN .....</b>                                                            | <b>ii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN .....</b>                                                                          | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                   | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                            | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                              | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                                                             | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                           | <b>xii</b> |
| <br><b>BAB I      PENDAHULUAN</b>                                                                      |            |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                        | 1          |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                               | 23         |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                                             | 23         |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                                            | 24         |
| <br><b>BAB II      KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL<br/>                 DAN HIPOTESIS PENELITIAN</b> |            |
| A. Kajian Teori .....                                                                                  | 25         |
| 1. Kesejahteraan .....                                                                                 | 25         |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi .....                                                                           | 29         |
| 3. Infrastruktur .....                                                                                 | 34         |
| 4. Indeks Pembangunan Manusia .....                                                                    | 40         |
| 5. Korupsi .....                                                                                       | 51         |
| B. Penelitian Relevan.....                                                                             | 60         |
| C. Kerangka Konseptual .....                                                                           | 63         |
| D. Hipotesis Penelitian .....                                                                          | 65         |

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....               | 67 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian .....    | 67 |
| C. Jenis dan Sumber Data .....          | 67 |
| D. Defenisi Operasional Variabel .....  | 68 |
| E. Teknik Pengumpulan Data .....        | 69 |
| F. Teknik Analisis Data.....            | 70 |
| G. Koefisien Determinan ( $R^2$ ) ..... | 79 |
| H. Pengujian Hipotesis .....            | 80 |

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| A. Hasil Penelitian.....                     | 83  |
| 1. Gambaran Umum SDA Wilayah Penelitian..... | 83  |
| B. Deskripsi Variabel Penelitian .....       | 87  |
| C. Analisis Induktif.....                    | 107 |
| D. Pembahasan .....                          | 135 |

### **BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| A. Simpulan ..... | 146 |
| B. Saran.....     | 148 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b> | <b>150</b> |
|---------------------------------|------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>LAMPIRAN .....</b> | <b>156</b> |
|-----------------------|------------|

## DAFTAR TABEL

| Tabel                                                                                                  | Halaman |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Tahun 2014-2018.....     | 4       |
| 2. Pertumbuhan Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia dan Korupsi di Indonesia Tahun 2015-2018..... | 11      |
| 3. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen Indeks Pembangunan Manusia .....                                | 46      |
| 4. Klasifikasi Nilai d.....                                                                            | 79      |
| 5. Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Pengeluaran Per kapita Tahun 2014-2018.....                    | 89      |
| 6. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Perkapita Atas Harga Konstan 2010).....                                   | 94      |
| 7. Infrastruktur Berdasarkan Panjang Jalan Tahun 2014-2018 di Indonesia.....                           | 99      |
| 8. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014-2018 di Indonesia.....                                        | 103     |
| 9. Korupsi di Indonesia Berdasarkan Pengaduan Masyarakat Tahun 2014-2018.....                          | 105     |
| 10. Hasil Uji Chow.....                                                                                | 108     |
| 11. Hasil Uji Hausman.....                                                                             | 110     |
| 12. Hasil Uji Multikolinearitas.....                                                                   | 110     |
| 13. Hasil Uji Heterokedastisitas.....                                                                  | 111     |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| 14. Hasil Uji Autokorelasi.....                              | 112 |
| 15. Hasil Klasifikasi nilai d (D-W) hasil Durbin Watson..... | 113 |
| 16. Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....                      | 114 |
| 17. Hasil Uji t .....                                        | 115 |
| 18. Hasil Uji F.....                                         | 117 |

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

#### Halaman

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia ..... | 21 |
| 2. Kerangka Konseptual.....                | 65 |

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

#### Halaman

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 1. Tabulasi Data Penelitian.....              | 157 |
| 2. Hasil Uji Chow.....                        | 163 |
| 3. Hasil Uji Hausman.....                     | 164 |
| 4. Hasil Uji Multikolonearitas.....           | 165 |
| 5. Hasil Uji Heterokedastisitas.....          | 166 |
| 6. Hasil Uji Autokorelasi.....                | 167 |
| 7. Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....        | 168 |
| 8. Hasil Uji t.....                           | 169 |
| 9. Hasil Uji F.....                           | 170 |
| 10. Hasil Uji Chow.....                       | 171 |
| 11. Hasil Uji Hauman.....                     | 172 |
| 12. Hasil Uji Multikolonearitas.....          | 173 |
| 13. Hasil Uji Heterokedastisitas.....         | 174 |
| 14. Hasil Uji Autokorelasi.....               | 175 |
| 15. Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....       | 176 |
| 16. Hasil Uji t.....                          | 177 |
| 17. Hasil Uji F.....                          | 178 |
| 18. Hasil Uji Chow.....                       | 179 |
| 19. Hasil Uji Hausman.....                    | 180 |
| 20. Hasil Koefisien Determinan ( $R^2$ )..... | 181 |
| 21. Hasil Uji t.....                          | 182 |
| 22. Tabel t.....                              | 183 |
| 23. Tabel F.....                              | 184 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan merupakan dambaan setiap manusia dalam hidupnya. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan manusia dari kebutuhan yang bersifat paling dasar seperti makan dan minum dan pakaian hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hal mendasar yang mampu membuat manusia merasakan kesejahteraan. Menjadi manusia yang sejahtera tentu menjadi salah satu tujuan hidup, namun kesejahteraan tidak dapat dicapai begitu saja.

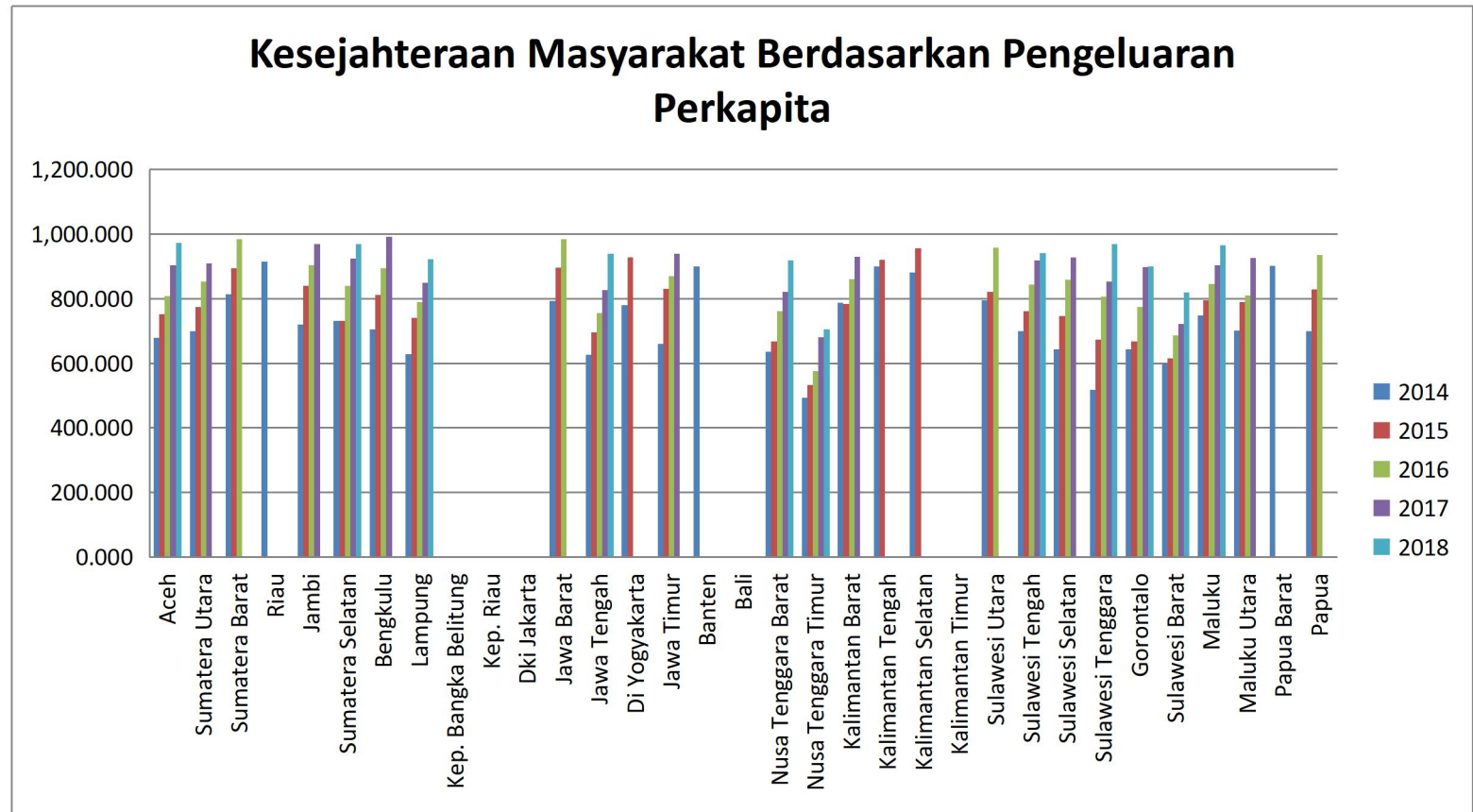
Kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status yang masih rendah.

Kesejahteraan sebagai kualitas kepuasan hidup yang bertujuan untuk mengukur posisi anggota masyarakat dalam membangun keseimbangan hidup yaitu kesejahteraan materi, kesejahteraan bermasyarakat, kesejahteraan emosi dan keamanan. Kajian organisasi

dalam keluarga menggunakan permintaan terhadap barang strategis sebagai indikator kesejahteraan. Ukuran lainnya kesejahteraan yaitu proporsi pengeluaran pangan. Kesejahteraan merupakan pencerminan dari kualitas hidup manusia (*quality of human life*).

Kesejahteraan masyarakat dapat disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap Negara tidak terkecuali bagi Indonesia. Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah semata-mata guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu sendiri dan selanjutnya akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional riil. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengalami pertambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi biasanya dikaitkan dengan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2010:11



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2014-2018

**Gambar 1.1** kesejahteraan masyarakat Tahun 2014-2018

Pada gambar 1.1 diatas dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat mengalami tren positif yaitu meningkat setiap tahunnya. Kesejahteraan masyarakat pada tahun 2014 sampai tahun 2018 tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 sebesar 2.039.157. hal ini disebabkan tingkat inflasi yang rendah dan daya beli masyarakat yang tinggi, ini ditunjang oleh pendapatan masyarakat yang tinggi juga. Sedangkan Provinsi yang tingkat kesejahteraannya rendah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2014 sebesar 493.088. hal ini dikarenakan pembangunan manusia yang belum merata sehingga berdampak terhadap kualitas sumberdaya manusia sehingga akan menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat, sehingga rendahnya daya beli masyarakat.

**Tabel 1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia Tahun 2014-2018**

| Provinsi             | Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Perkapita Atas Harga Konstan 2010 (%) |       |      |      |      | Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Pengeluaran Perkapita (%) |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2014                                                                       | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                                                           | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
| Aceh                 | 1,55                                                                       | -0,73 | 3,30 | 4,19 | 4,59 | 8,36                                                           | 10,36 | 7,44  | 11,74 | 7,84  |
| Sumatera Utara       | 5,23                                                                       | 5,1   | 5,18 | 5,12 | 5,18 | 6,57                                                           | 10,86 | 10,14 | 6,57  | 10,10 |
| Sumatera Barat       | 5,88                                                                       | 5,53  | 5,27 | 5,29 | 5,15 | 7,28                                                           | 10,05 | 10,10 | 6,98  | 8,99  |
| Riau                 | 2,71                                                                       | 0,22  | 2,23 | 2,71 | 2,26 | 4,01                                                           | 9,88  | 7,88  | 3,33  | 5,96  |
| Jambi                | 7,36                                                                       | 4,21  | 4,37 | 4,64 | 4,71 | 5,66                                                           | 16,60 | 7,56  | 7,18  | 8,58  |
| Sumatera Selatan     | 4,79                                                                       | 4,42  | 5,04 | 5,51 | 9,84 | 13,57                                                          | 0,11  | 14,80 | 10,14 | 4,89  |
| Bengkulu             | 5,48                                                                       | 5,13  | 5,29 | 4,99 | 4,97 | 7,85                                                           | 14,91 | 10,32 | 10,74 | 11,79 |
| Lampung              | 5,08                                                                       | 5,13  | 5,15 | 5,17 | 5,24 | 9,57                                                           | 17,93 | 6,46  | 7,63  | 8,64  |
| Kep. Bangka Belitung | 4,67                                                                       | 4,08  | 4,11 | 4,51 | 4,41 | 11,49                                                          | 6,72  | 8,39  | 12,3  | 4,30  |
| Kep. Riau            | 6,6                                                                        | 6,02  | 5,02 | 2,01 | 4,51 | 15,57                                                          | 5,75  | 8,95  | 6,81  | 0,61  |
| Dki Jakarta          | 5,91                                                                       | 5,91  | 5,88 | 6,22 | 6,12 | 11,77                                                          | 3,81  | 5,82  | 6,44  | 2,09  |
| Jawa Barat           | 5,09                                                                       | 5,05  | 5,66 | 5,29 | 5,71 | 9,22                                                           | 12,99 | 9,70  | 12,14 | 10,40 |
| Jawa Tengah          | 5,27                                                                       | 5,47  | 5,27 | 5,27 | 5,28 | 11,85                                                          | 11,15 | 8,75  | 9,32  | 13,46 |
| Di Yogyakarta        | 5,17                                                                       | 4,95  | 5,05 | 5,26 | 6,20 | 0,38                                                           | 19,00 | 15,33 | 6,46  | 14,25 |

|                     |      |       |       |      |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Jawa Timur          | 5,86 | 5,44  | 5,57  | 5,45 | 5,51  | 15,41 | 25,85 | 4,81  | 7,86  | 7,17  |
| Banten              | 5,51 | 5,45  | 5,28  | 5,71 | 5,84  | 12,61 | 12,26 | 9,97  | 10,28 | 10,59 |
| Bali                | 6,73 | 6,03  | 6,32  | 5,59 | 6,34  | 6,84  | -3,04 | 5,21  | 21,15 | 2,62  |
| Nusa Tenggara Barat | 5,17 | 21,76 | 5,82  | 0,11 | -4,57 | 16,12 | 5,11  | 13,78 | 7,94  | 11,83 |
| Nusa Tenggara Timur | 5,05 | 4,92  | 5,17  | 5,16 | 5,02  | 14,13 | 8,27  | 8,00  | 18,18 | 3,41  |
| Kalimantan Barat    | 5,03 | 4,88  | 5,20  | 5,17 | 5,05  | 17,03 | -0,47 | 9,86  | 8,01  | 10,71 |
| Kalimantan Tengah   | 6,21 | 7,01  | 6,36  | 6,74 | 5,62  | 14,76 | 2,23  | 13,47 | 8,63  | 7,87  |
| Kalimantan Selatan  | 4,84 | 3,82  | 4,40  | 5,29 | 5,12  | 8,17  | 8,60  | 9,53  | 10,56 | 5,93  |
| Kalimantan Timur    | 1,71 | -1,2  | -0,36 | 3,13 | 2,64  | 5,77  | 5,88  | 8,65  | 11,33 | 8,06  |
| Sulawesi Utara      | 6,31 | 6,12  | 6,17  | 6,32 | 5,99  | 5,2   | 3,19  | 16,70 | 15,59 | 4,95  |
| Sulawesi Tengah     | 5,07 | 15,5  | 9,98  | 7,14 | 6,22  | 7,94  | 8,65  | 10,82 | 8,95  | 2,43  |
| Sulawesi Selatan    | 7,54 | 7,19  | 7,42  | 7,23 | 7,04  | 7,48  | 15,90 | 15,10 | 7,96  | 9,52  |
| Sulawesi Tenggara   | 6,26 | 6,88  | 6,51  | 6,18 | 6,37  | 8,87  | 29,84 | 19,76 | 5,85  | 13,59 |
| Gorontalo           | 7,27 | 6,22  | 6,52  | 6,74 | 6,50  | 10,98 | 3,63  | 16,05 | 15,99 | 0,15  |
| Sulawesi Barat      | 8,86 | 7,31  | 6,01  | 6,67 | 6,18  | 6,03  | 2,48  | 11,45 | 5,35  | 13,43 |
| Maluku              | 6,64 | 5,48  | 5,73  | 5,81 | 5,95  | 15,27 | 6,10  | 6,51  | 6,83  | 6,86  |
| Maluku Utara        | 5,49 | 6,1   | 5,77  | 7,67 | 7,92  | 15,52 | 12,46 | 2,47  | 14,51 | 8,59  |
| Papua Barat         | 5,38 | 4,15  | 4,52  | 4,01 | 6,23  | 11,83 | 14,18 | -2,02 | 11,14 | 11,02 |
| Papua               | 3,65 | 7,35  | 9,14  | 4,64 | 7,33  | 3,57  | 18,53 | 12,85 | 15,32 | 4,15  |
| <b>Indonesia</b>    | 5,01 | 4,88  | 5,03  | 5,07 | 5,17  | 10,3  | 11,96 | 8,91  | 9,54  | 8,51  |

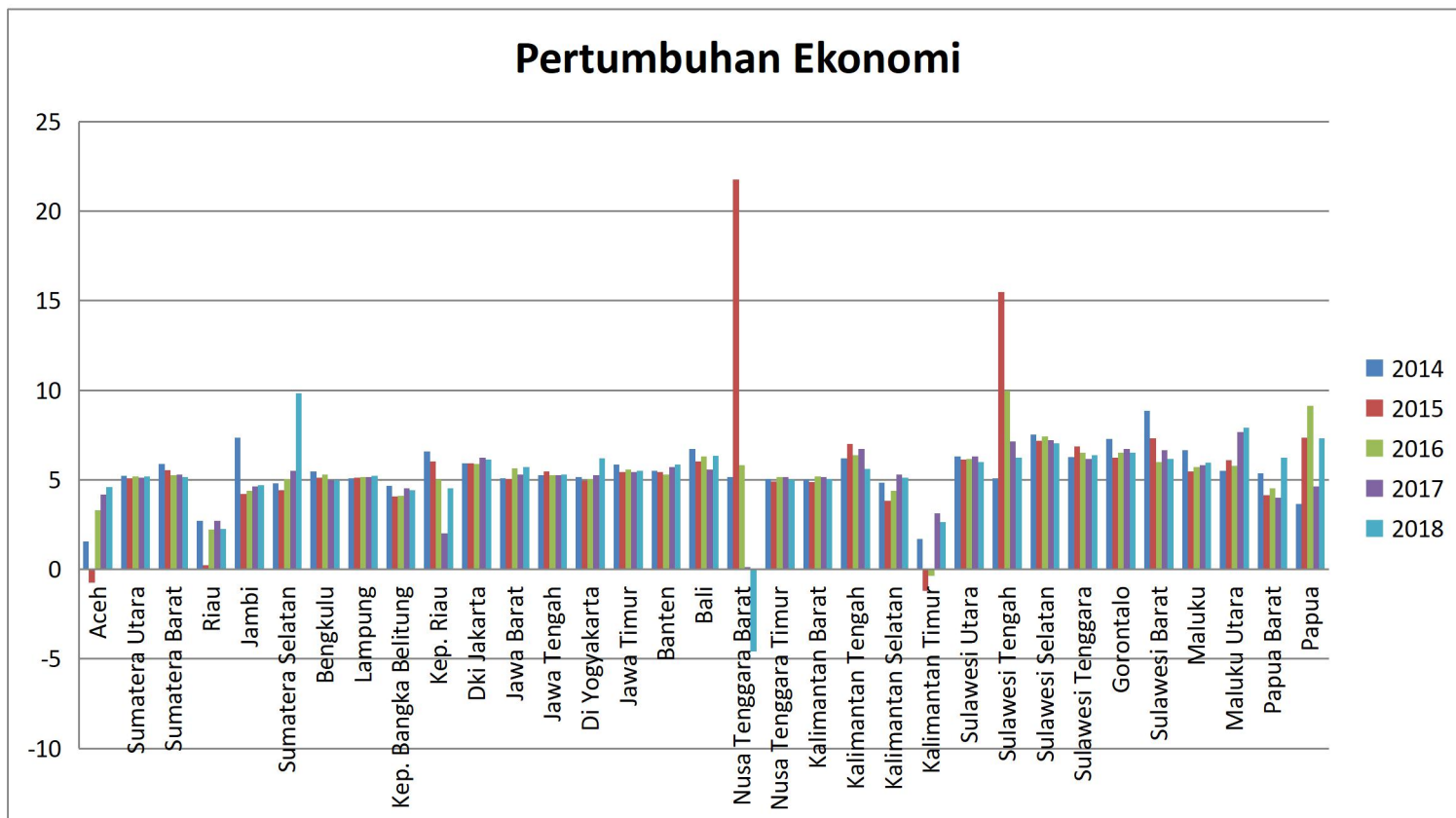
*Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2014-2018, data diolah*

Tabel 1 terlihat laju pertumbuhan ekonomi pada provinsi yang ada di Indonesia dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuasi. Yasa dan Sudarsana (2015) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dimana peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga meningkat pula konsumsi masyarakat. Tetapi pada faktanya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan dari 1.55 % ke - 0.73 %, sedangkan laju kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dari 8.36 % ke 10.36 %. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana laju pertumbuhan ekonomi tahun 2014 sampai

2015 mengalami peningkatan dari 5.17 % ke 21.76 %, sedangkan laju kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan dari 16.12 % ke 5.11 %. Hal ini juga terjadi di Provinsi Papua Barat dimana laju pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan dari 5.38 % ke 4.15 %, sedangkan laju kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan 11.83 % ke 14.18 %.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2017 sampai 2018 mengalami peningkatan dari 4.19 % ke 4.59 %, sedangkan laju kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan dari 11.74 % ke 7.84 %. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat dimana laju pertumbuhan ekonomi tahun 2017-2018 mengalami penurunan dari 5.17 % ke 5.05 %, sedangkan laju kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dari 8.01 % ke 10.71 %. Hal ini juga terjadi di Provinsi Papua dimana laju pertumbuhan ekonominya mengalami peningkatan dari 4.64 % ke 7.33 %, sedangkan laju kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan dari 15.32 % ke 4.15 %.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2011) bahwasannya sumberdaya manusia yang efektif adalah prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Saputri (2018) menyatakan bahwasannya infrastruktur jalan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Indeks pembangunan manusia dan infrastruktur juga salah satu yang mempengaruhi Kesejahteraan masyarakat. Indeks pembangunan manusia berperan penting dalam pembangunan perekonomian.



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2014-2018

**Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesi Tahun 2014-2018**

Pada gambar 1.2 diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 sampai tahun 2018 tertinggi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 sebesar 21.76 % . Hal ini disebabkan pertumbuhan yang signifikan dalam kategori pertambangan dan penggalian , ditambah dengan meningkatnya pertanian, kehutanan dan perikanan.. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 sebesar -4.57 %. Hal ini disebabkan oleh penurunan kinerja pada subkategori pertambangan bijih logam, sehingga berdampak pada penurunan nilai tambah bruto yang cukup berarti pada kategori pertambangan dan penggalian.

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur mutu modal manusia, United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Dewi dan I Ketut,2014).

Pentingnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana infrastruktur ini seperti yang dinyatakan oleh De dan Ghosh (2005:81)

bahwa kendala yang dihadapi daerah-daerah maupun negara-negara lebih kepada persoalan ekonomi yaitu bagaimana memastikan baiknya infrastruktur supaya lebih bermanfaat. Infrastruktur yang memadai menjadi salah satu jalan keluar untuk menunjang aktivitas perekonomian. Canning dan pedroni (2004) menyatakan bahwa efek dari tersedianya infrastruktur sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Salah satu bentuk infrastruktur adalah sarana jalan dan ketersediaan air bersih, namun kenyataannya pada saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia masih dianggap belum merata, karena pembangunan masih terpusat pada kota-kota besar saja. Akses yang sulit, dan pemeliharaan terhadap fasilitas infrastruktur yang kurang menyebabkan, pengelolaan air bersih menjadi salah satu masalah yang paling mendesak di Indonesia (McCawley, 2015).

Perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika output barang dan jasa meningkat. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam lingkup regional dikatakan sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mana dalam upaya peningkatannya tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur yang membuat pembangunan infrastruktur menjadi salah satu aspek utama untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Masyarakat dapat merasakan keberadaan sebuah negara melalui adanya empat hal, yaitu jalan sebagai sarana mobilitas, penyediaan fasilitas pendidikan dengan

adanya sekolah, pelayanan kesehatan dan penyediaan infrastruktur ekonomi yaitu jalan, listrik, air, hingga telekomunikasi.

Sukirno (2012:423) menyebutkan bahwa kemakmuran ditentukan pula oleh fasilitas untuk mendapatkan suplai listrik dan air minum atau bersih, fasilitas pendidikan yang diperoleh dan taraf pendidikan yang dicapai, tingkat kesehatan dan fasilitas perobatan yang tersedia, keadaan perumahan masyarakat miskin dan taraf perkembangan infrastruktur yang dicapai. Infrastruktur juga memiliki keterkaitan dengan ketenagakerjaan, Kontribusi dari adanya infrastruktur di Indonesia begitu terlihat peranannya dalam menunjang kegiatan perekonomian. Hal tersebut dapat dilihat dalam setiap bidang infrastruktur. Pada bidang transportasi baik melalui moda darat, kereta api, laut dan udara kuantitas serta kualitas sarana infrastruktur diperlukan untuk mengatasi hambatan yang mengganggu kelancaran arus barang dan mobilitas manusia seperti kemacetan sampai dengan kecelakaan. Infrastruktur sumber daya air berkaitan dengan penyediaan prasarana irigasi yang bertujuan untuk memaksimalkan produksi padi dan mewujudkan ketahanan pangan. Listrik merupakan energi yang banyak digunakan dalam setiap aktivitas sehingga pendistribusiannya dapat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Sedangkan infrastruktur kesehatan dan pendidikan menunjang kualitas sumber daya manusia.

Peningkatan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang-

barang, terdapatnya pengangkutan barang-barang dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas dari jasa-jasa pengangkutan tersebut. Maka hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga terwujudlah kesejahteraan masyarakat. Pada table 2 dibawah ini menjelaskan pertumbuhan indeks pembangunan manusia dan infrastruktur provinsi di Indonesia.

**Tabel 2 Pertumbuhan Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia dan Korupsi di Indonesia Tahun 2014-2018**

| Provinsi             | Infrastruktur Berdasarkan Infrastruktur Jalan (%) |       |       |       |       | Indeks Pembangunan Manusia (%) |      |      |      |      | Korupsi Berdasarkan Pengaduan Masyarakat (%) |       |        |       |       |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
|                      | 2014                                              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2014                           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014                                         | 2015  | 2016   | 2017  | 2018  |
| Aceh                 | 0,42                                              | 14,60 | 2,24  | 0,13  | -0,22 | 0,75                           | 0,93 | 0,79 | 0,86 | 0,84 | 159,56                                       | 66,01 | -39,17 | 10,96 | 22,22 |
| Sumatera Utara       | 1,49                                              | 23,88 | -4,26 | 6,89  | 4,48  | 0,75                           | 0,93 | 0,70 | 0,81 | 0,86 | 11,95                                        | 38,04 | -14,65 | 13,46 | -72   |
| Sumatera Barat       | 1,29                                              | 4,53  | 3,80  | 4,31  | 2,21  | 0,65                           | 0,89 | 1,07 | 0,72 | 0,69 | 0,00                                         | 33,80 | 23,81  | 41,35 | 270,8 |
| Riau                 | 1,60                                              | 18,84 | 11,86 | 3,19  | 2,18  | 0,60                           | 0,73 | 0,51 | 0,83 | 0,91 | 17,75                                        | 38,60 | 12,57  | 30,32 | -21,2 |
| Jambi                | 2,33                                              | 26,74 | 1,62  | 0,98  | 4,20  | 0,71                           | 0,95 | 1,50 | 0,10 | 0,94 | 15,91                                        | 16,34 | -31,25 | 56,82 | -10,1 |
| Sumatera Selatan     | 0,09                                              | 1,26  | -4,86 | 15,28 | 23,93 | 0,89                           | 1,06 | 1,16 | 0,91 | 0,77 | 34,25                                        | 18,68 | 7,56   | 4,43  | -30,2 |
| Bengkulu             | 0,63                                              | 2,92  | -0,78 | 1,55  | 0,11  | 0,83                           | 0,78 | 1,08 | 0,89 | 0,99 | -33,06                                       | 33,73 | 27,27  | 67,14 | -25,6 |
| Lampung              | 1,84                                              | 4,33  | 0,69  | -0,10 | 2,56  | 1,05                           | 0,80 | 1,05 | 0,89 | 1,13 | 8,67                                         | 28,22 | -23,08 | 28,89 | 46,55 |
| Kep. Bangka Belitung | 0,18                                              | 18,04 | -0,23 | 0,03  | -0,53 | 0,52                           | 1,14 | 0,72 | 0,63 | 0,97 | 41,03                                        | 5,45  | -65,52 | 40,00 | 146,4 |
| Kep. Riau            | 2,46                                              | 52,43 | 4,93  | 1,22  | 1,43  | 0,52                           | 0,48 | 0,33 | 0,62 | 0,52 | 46,43                                        | 28,05 | -11,86 | 11,54 | -19   |
| Dki Jakarta          | 0,56                                              | 62,82 | -0,09 | -4,45 | -6,55 | 0,40                           | 0,77 | 0,77 | 0,58 | 0,51 | -8,83                                        | 31,72 | 17,47  | -9,48 | 1,79  |
| Jawa Barat           | 0,03                                              | 26,28 | 1,08  | 0,75  | -6,55 | 0,81                           | 1,02 | 0,79 | 0,91 | 0,86 | 14,01                                        | 39,97 | 13,15  | 7,81  | 12,9  |
| Jawa Tengah          | 2,23                                              | 1,29  | 2,75  | 5,25  | -1,43 | 1,12                           | 1,03 | 0,71 | 0,77 | 0,85 | 1,83                                         | 39,55 | 6,69   | 37,28 | 1,78  |
| Di Yogyakarta        | 0,01                                              | 11,23 | -1,78 | -0,85 | 2,27  | 0,48                           | 1,02 | 1,02 | 0,65 | 0,81 | 66,27                                        | 37,68 | -32,56 | 31,03 | 82,50 |
| Jawa Timur           | 3,63                                              | 12,84 | -1,62 | -6,71 | 9,39  | 0,87                           | 1,19 | 1,15 | 0,76 | 0,71 | 15,16                                        | 31,35 | 3,20   | 10,20 | 9,92  |
| Banten               | 2,19                                              | 19,07 | 1,24  | -6,13 | 12,70 | 0,60                           | 0,54 | 0,98 | 0,65 | 0,74 | 19,42                                        | 24,70 | 1,60   | 43,31 | 1,01  |
| Bali                 | 0,08                                              | 15,34 | -1,36 | 0,61  | 1,66  | 0,54                           | 1,09 | 0,52 | 0,88 | 0,63 | 32,89                                        | 31,68 | -11,59 | 4,92  | -14,1 |
| Nusa Tenggara Barat  | 0,02                                              | 46,51 | -0,62 | -1,23 | -0,27 | 0,86                           | 1,37 | 0,95 | 1,17 | 1,08 | 14,14                                        | 30,97 | -6,41  | 0,00  | 23,29 |
| Nusa Tenggara Timur  | 1,84                                              | 18,98 | -0,32 | 2,66  | 6,35  | 0,94                           | 0,66 | 0,73 | 0,95 | 104  | 98,90                                        | 43,09 | -32,04 | 67,14 | 52,14 |
| Kalimantan Barat     | 0,71                                              | 24,96 | 0,05  | 2,40  | -1,15 | 0,92                           | 1,08 | 0,44 | 0,58 | 1,09 | 35,04                                        | 67,72 | 68,63  | 12,79 | -1,03 |
| Kalimantan Tengah    | 1,20                                              | 14,98 | -3,50 | 3,45  | -9,48 | 0,53                           | 1,12 | 0,88 | 0,95 | 0,9  | 14,69                                        | 37,20 | -9,71  | 2,15  | 6,32  |
| Kalimantan Selatan   | 1,66                                              | 34,42 | 0,27  | -3,97 | 2,49  | 0,68                           | 1,11 | 0,98 | 0,87 | 0,75 | 20,39                                        | 19,35 | 6,00   | 49,06 | -1,27 |
| Kalimantan Timur     | 4,37                                              | 19,39 | -0,66 | 1,21  | -2,50 | 0,83                           | 0,47 | 0,57 | 0,71 | 0,95 | 30,77                                        | 25,63 | -31,64 | 20,66 | 21,92 |
| Sulawesi Utara       | 0,77                                              | 19,21 | 5,41  | -2,40 | 3,66  | 0,68                           | 0,61 | 0,94 | 0,86 | 0,75 | 17,89                                        | 42,86 | 9,38   | 24,29 | 49,43 |

|                   |      |       |       |       |       |      |      |      |      |      |        |       |        |       |       |
|-------------------|------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|-------|-------|
| Sulawesi Tengah   | 0,82 | 9,44  | -0,08 | 1,34  | -0,47 | 0,97 | 0,50 | 1,06 | 0,95 | 1,13 | 75,00  | 41,67 | -28,57 | 62,86 | -1,75 |
| Sulawesi Selatan  | 4,55 | -0,11 | 0,10  | -2,49 | 5,33  | 0,84 | 0,96 | 0,88 | 0,83 | 0,80 | 27,44  | 26,79 | 10,46  | 1,18  | -1,17 |
| Sulawesi Tenggara | 5,06 | 3,84  | 3,72  | 1,56  | 0,77  | 0,77 | 1,00 | 0,81 | 0,79 | 1,07 | 78,87  | 51,97 | 22,95  | 42,67 | -7,48 |
| Gorontalo         | 7,33 | 12,64 | 3,91  | 5,69  | -2,35 | 0,73 | 1,06 | 0,65 | 1,09 | 1,04 | 108,70 | 56,25 | 4,76   | 18,18 | 188,9 |
| Sulawesi Barat    | 0,25 | 15,60 | 0,79  | 3,81  | -2,11 | 1,15 | 1,16 | 1,02 | 1,10 | 1,24 | -5,56  | 47,06 | 166,67 | 29,17 | 94,12 |
| Maluku            | 6,70 | 37,71 | 3,19  | 3,10  | 7,57  | 0,98 | 0,46 | 0,82 | 0,87 | 1,00 | -4,30  | 41,57 | 84,62  | 30,21 | 1,49  |
| Maluku Utara      | 0,11 | 90,29 | 4,64  | 1,16  | 8,77  | 0,62 | 1,12 | 1,09 | 0,86 | 0,83 | 0,00   | 25,93 | 85,00  | 35,14 | 41,67 |
| Papua Barat       | 1,22 | 19,68 | 3,47  | 3,93  | 2,41  | 0,61 | 0,73 | 0,78 | 1,25 | 1,19 | 8,57   | 15,79 | 15,63  | 64,86 | -27,9 |
| Papua             | 1,21 | 20,37 | -1,37 | -0,33 | 7,28  | 0,89 | 0,88 | 1,40 | 1,79 | 1,64 | 32,58  | 43,22 | 23,88  | 42,17 | -15,3 |
| <b>Indonesia</b>  | 1,92 | 0,08  | 3,80  | 0,49  | 0,03  | 0,86 | 0,94 | 0,91 | 0,90 | 0,82 | 16,78  | 35,47 | 2,09   | 13,23 | 4,78  |

*Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2014-2018, Laporan Tahunan KPK, data diolah*

Table 2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi. Pertumbuhan indeks pembangunan manusia dari tahun 2014 sampai 2018 yang tertinggi yaitu Provinsi Papua tahun 2017 sebesar 1.79 %, sedangkan pertumbuhan indeks pembangunan manusia dari tahun 2014 sampai 2018 yang terendah yaitu Provinsi Jambi tahun 2017 sebesar 0.10 %.

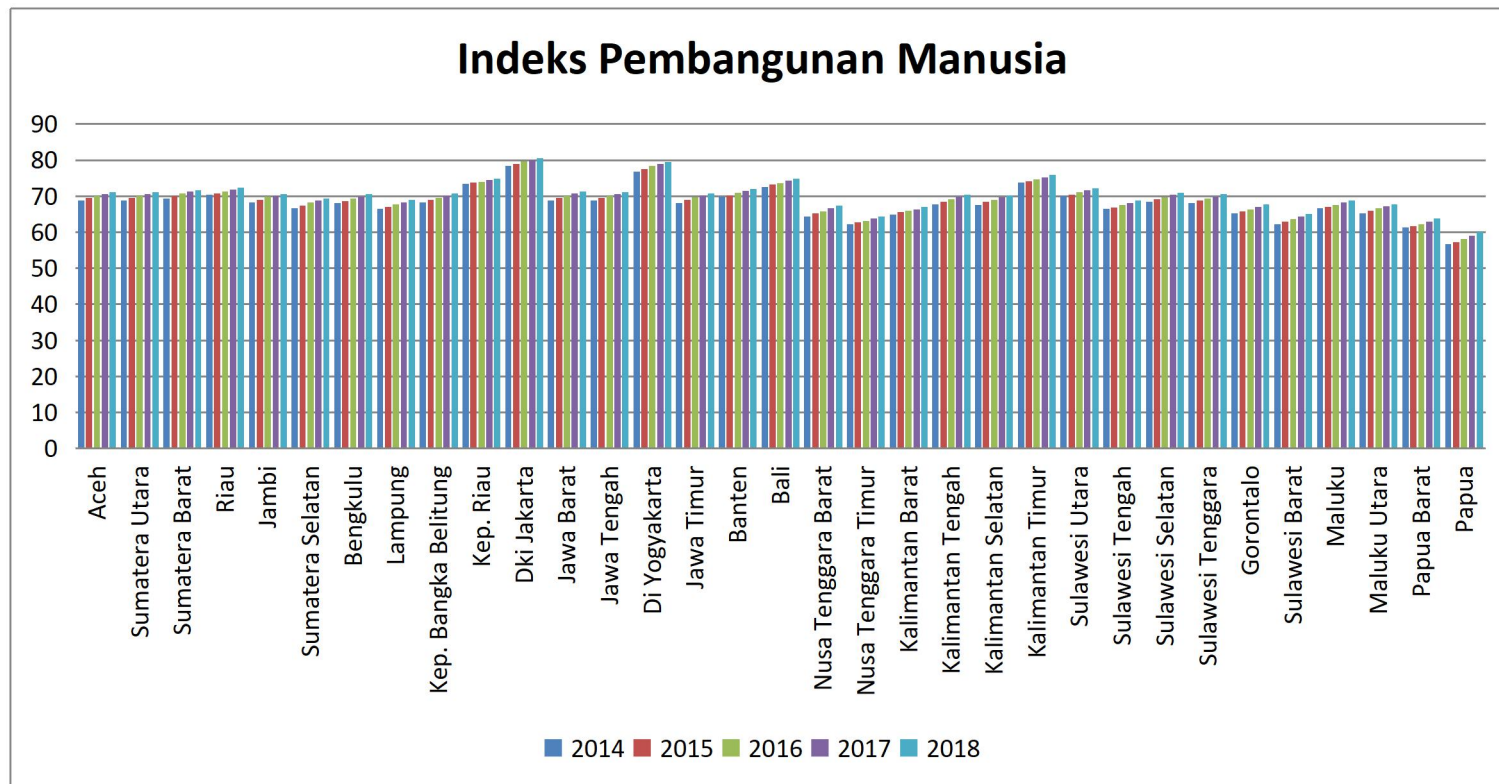
Indeks pembangunan manusia yang efektif adalah prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sulistyowati, 2011). Namun pada faktanya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan dari 1.55 % ke -0.73 %, sedangkan pertumbuhan indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan dari 0.75 % ke 0.93 %. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Bali pada tahun 2014 sampai 2015 dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 6.73 % ke 6.03 %, sedangkan pertumbuhan indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan 0.54 % ke 1.09 %. Begitu juga di Provinsi Gorontalo tahun 2014 sampai 2015

dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 7.27 % ke 6.22 %, sedangkan pertumbuhan indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan dari 0.73 % ke 1.06 %. Hal ini juga terjadi di Provinsi Jawa Barat 2017 sampai 2018 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari 5.29 % ke 5.71 %, sedangkan pertumbuhan indeks pembangunan manusia mengalami penurunan dari 0.91 % ke 0.86 %.

Indeks pembangunan manusia sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena akan meningkatkan keahlian dan kreatifitas manusia sehingga akan menyebabkan meningkatnya pendapatan dan akan berefek kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun pada faktanya pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Provinsi Bengkulu tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan dari 0.83 % ke 0.78 %, sedangkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan dari 7.85 % ke 14.91 %. Begitu juga dengan pertumbuhan indeks pembangunan manusia di Kep. Riau pada tahun 2015 sampai 2016 mengalami penurunan dari 0.48 % ke 0.33 %, sedangkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan 5.75 % ke 8.95 %. Begitu juga di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2017 sampai 2018 dimana pertumbuhan indeks pembangunan manusia mengalami penurunan dari 0.83 % ke 0.80 %, sedangkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan dari 7.96 % ke 9.52 %.

Pada Gambar 1.3 dibawah dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia mengalami tren yang positif, dimana senantiasa

mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Indeks pembangunan manusia Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2018 yaitu Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks pembangunan yang tertinggi dari provinsi lainnya yakni pada tahun 2018 sebesar 80.47. ini disebabkan DKI Jakarta merupakan ibukota negara, segala pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain banyak terdapat disana. Kemudian diikuti oleh provinsi Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kep. Riau dan Bali yang masing-masing indeks pembangunannya sebesar 79.53, 75.83, 74.84 dan 74.77 pada tahun 2018. Sedangkan indeks pembangunan manusia terendah yaitu pada Provinsi Papua tahun 2014 sebesar 56.75. hal ini disebabkan belum meratanya indeks pembangunan manusia di sana disebabkan negara yang jauh dari ibu kota, juga karena memiliki tradisi yang kental disana sehingga sulit untuk membawa peningkatan pembangunan manusia.



Sumber : BPS, Statistik Indonesia Tahun 2014-2018

**Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2014-2018**

Table 2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Indeks pembangunan manusia seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Indeks pembangunan manusia Indonesia dari tahun 2014-2018 yaitu Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi dari provinsi lainnya yakni pada tahun 2018 sebesar 80.47. Ini disebabkan DKI Jakarta merupakan ibukota negara, segala pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain banyak terdapat disana. Kemudian diikuti oleh Provinsi Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kep. Riau, dan Bali yang masing-masing memiliki indeks pembangunan manusia sebesar 79.53, 75.83, 74.84 dan 74.77 pada tahun 2018.

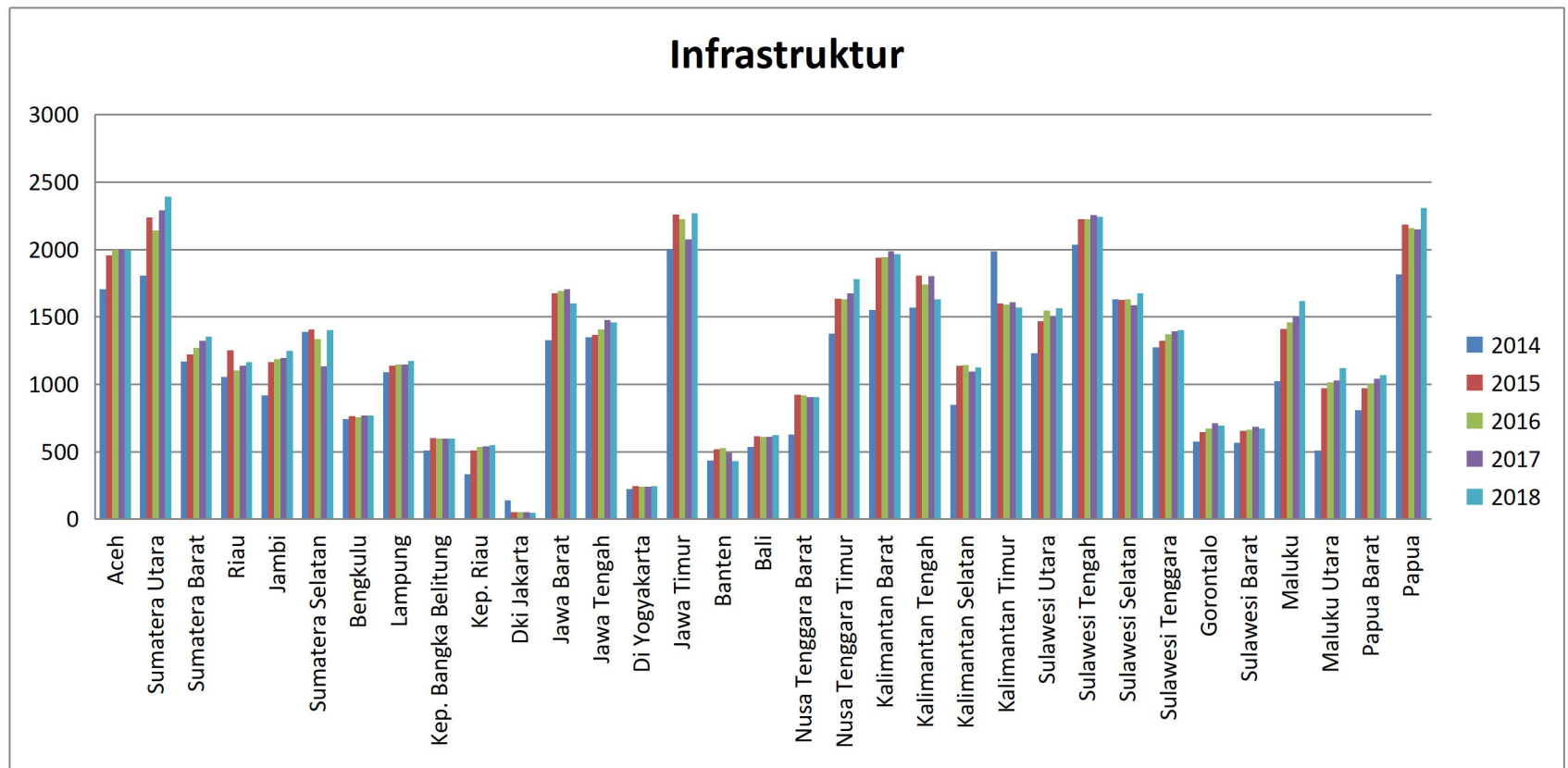
Nugraheni (2012) menyatakan bahwa belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah dapat berkontribusi pada perekonomian apabila benar – benar diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada faktanya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tahun 2014 sampai 2015 mengalami penurunan dari 5.51 % ke 5.45 %, sedangkan pertumbuhan infrastruktur mengalami peningkatan dari -2.19 % ke 19.07 %. Begitu juga yang terjadi di Sulawesi Utara pada tahun 2015 sampai 2016 dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari 6.17 % ke 6.32 %, sedangkan

pertumbuhan infrastruktur mengalami penurunan dari 5.41 % ke -2.40 %. Begitu juga di Provinsi Papua Barat tahun 2017 sampai 2018 dimana laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan dari 4.01 % ke 6.23 %, sedangkan pertumbuhan infrastruktur mengalami penurunan dari 3.93 % ke 2.41 %.

Infrastruktur yang memadai akan memicu kegiatan produksi, sehingga menggerakkan sektor riil sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga terciptalah kesejahteraan masyarakat. Namun pada faktanya pertumbuhan infrastruktur di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 sampai 2015 mengalami kenaikan dari -9.09 % ke 1.26 %, sedangkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan dari 13.57 % ke 0.11 %. Begitu juga dengan pertumbuhan infrastruktur di Sulawesi Tengah pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan dari -0.08 % ke 1.34 %, sedangkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat mengalami penurunan dari 10.82 % ke 8.95 %. Begitu juga di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017 sampai 2018 dimana pertumbuhan infrastruktur mengalami penurunan dari 3.81 % ke -2.11 %, sedangkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat mengalami kenaikan dari 5.35 % ke 13.43 %.

Pemahaman mengenai pengaruh indeks pembangunan manusia dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat penting bagi pengambil kebijakan ekonomi dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dari tahun

ke tahun sangat dibutuhkan oleh suatu wilayah sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu perlu diketahui seberapa besar indeks pembangunan manusia dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.



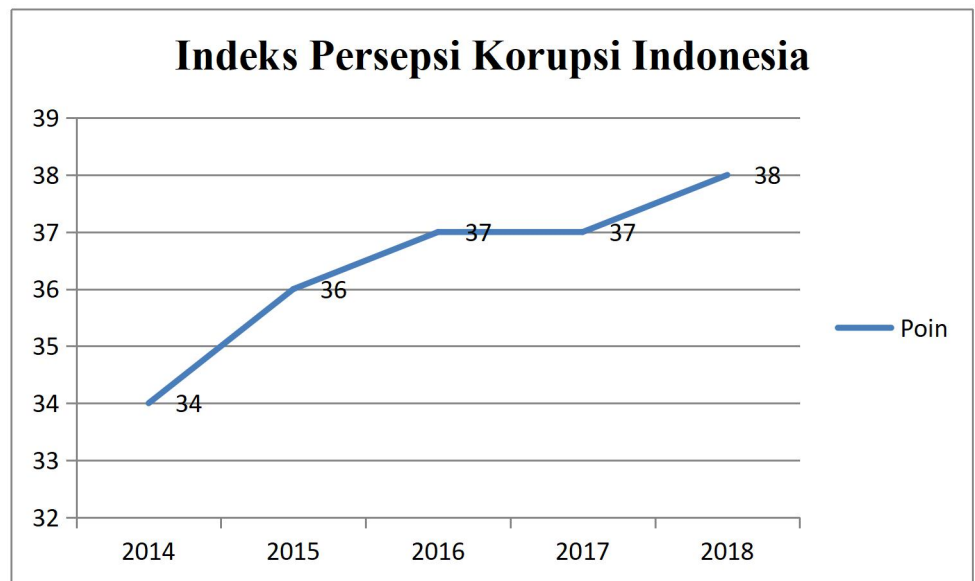
Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2014-2018

**Gambar 1.4 Infrastruktur di Indonesia Tahun 2014-2018**

Pada gambar 1.4 di atas dapat dilihat bahwasannya infrastruktur di Indonesia tahun 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan. Infrastruktur di Indonesia dari tahun 2014-2018 yaitu Provinsi Sumatera Utara yaitu pada tahun 2018 sebesar 2392.60 Km. Hal ini disebabkan karena mempunyai daerah tersebut untuk menekan tingkat inflasi yang ada di Provinsi Sumatera Utara, sehingga tingkat inflasinya lebih rendah dari pada inflasi nasional, serta juga dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur yang besar disana seperti pembangunan jalan tol, bandara kualanamu, KEK Mangke, Pelabuhan Kuala Tanjung, Bandara Silangit dan infrastruktur lainnya seperti infrastruktur jalan yang semakin memadai. Sedangkan wilayah dengan infrastruktur terendah yaitu Provinsi DKI Jakarta sebesar 47.11 Km. hal ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut tidak semasif tahun-tahun sebelumnya, sehingga berdampak terhadap jumlah infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta.

Tingginya tingkat korupsi akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Namun dilihat dari data diatas dimana pada tahun 2014 sampai 2015 di Provinsi Sumatera Utara dimana pertumbuhan korupsi mengalami peningkatan dari 11.95 % ke 38.04 %, namun pertumbuhan kesejahteraan mengalami peningkatan dari 6.57 % ke 10.86 %. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Banten dimana pada tahun 2016 sampai 2017 pertumbuhan korupsi mengalami peningkatan dari 1.60 % ke 43.31 %, namun pertumbuhan kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan dari 9.97 % ke 10.28 %. Begitu juga pada di

Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017 sampai tahun 2018 pertumbuhan korupsi mengalami penurunan dari 49.06 % ke -1.27 %, sedangkan pertumbuhan kesejahteraan juga mengalami penurunan dari 10.56 % ke 5.93 %.



Sumber : *Corruption Perception Indeks (CPI) 2014 - 2018*

### **Gambar 1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2014-2018**

Pada gambar 1.5 terlihat bahwa pada tahun 2014 Indonesia mencatat skor *Corruption Perception Index*(CPI) yaitu 34 hingga pada tahun 2018 meningkat dengan perolehan skor 38. Artinya korupsi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami *trend* positif. Akan tetapi peningkatan skor CPI di Indonesia masih tergolong rendah dan masih jauh dalam kategori bersih. Artinya tingkat korupsi di Indonesia masih tergolong pada keadaan tingkat korupsi yang tinggi.

Korupsi adalah fenomena global yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. Perdebatan

hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat masih berjalan sampai sekarang. Korupsi akan meningkatkan output jika suap yang lebih banyak membantu perekonomian menuju pertukaran bebas yang lebih besar. Jadi dalam perekonomian dimana kebebasan ekonomi tinggi dan suap menyebabkan pejabat publik malas dalam mengatur aktivitas perusahaan, maka output akan naik. Akan tetapi korupsi akan membatasi output ketika suap mengurangi kompetensi dan meningkatkan rigiditas pasar. Hasil ini lebih memungkinkan terjadi dinegara dimana kebebasan ekonomi rendah dikarenakan meluasnya kepemilikan asset oleh Negara, adanya monopoli dan tingginya tariff yang diberikan pemilik bisnis dengan mengatur para elit dan kroninya. Meningkatnya korupsi di Negara yang rendah kebebasan ekonominya berarti rendahnya persaingan dan pertukaran bebas dan membawa ke jatuhnya output.

Menurut Swaleheen dan Stansel (2007) menyatakan korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi, ketika pelaku ekonomi memiliki pilihan yang sedikit kebebasan ekonomi rendah. Korupsi berkontribusi dalam mengurangi pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik , mengurangi pajak, membuat pemerintah justru bergandengan dengan para pencari rente daripada melakukan aktivitas yang produktif, dan akhirnya mendistorsi komposisi pengeluaran pemerintah, serta akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam seberapa besar pengaruh pembangunan manusia dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan judul **“Pengaruh Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia Dan Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
3. Bagaimana pengaruh pembangunan manusia terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia
4. Bagaimana pengaruh korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
2. Mengetahui indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia

3. Mengetahui pengaruh pembangunan manusia terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia
4. Mengetahui pengaruh korupsi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia
5. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan bagi pengembangan ilmu ekonomi makro
2. Bagi pengambil kebijakan seperti pemerintah Indonesia, BPS
3. Bagi peneliti lebih lanjut dalam meneliti tentang analisis pengaruh infrastruktur, indeks pembangunan manusia dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Bagi peneliti sebagai bahan skripsi dalam rangka memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi FE UNP.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Kesejahteraan**

Menurut Notowidagdo (2016:36) sejahtera adalah aman, sentosa dan makmur, selamat (terlepas dari segala gangguan, kesukaran dan lainnya). Kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang sesuai dengan standar kelayakan hidup yang dipersepsi masyarakat (Swasono, 2004). Tingkat kelayakan hidup dipahami secara relatif oleh berbagai kalangan dan latar belakang budaya, mengingat tingkat kelayakan ditentukan oleh persepsi normatif suatu masyarakat atas kondisi sosial, material, dan psikologis tertentu.

Menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usaha nya memenuhi kebutuhan material dan spiritual nya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan.

Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

Ada beberapa indikator keluarga sejahtera berdasarkan Badan Pusat Statistik (2012), yaitu:

1. Pendapatan
2. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
3. Keadaan tempat tinggal
4. Fasilitas tempat tinggal
5. Kesehatan anggota keluarga
6. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
7. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan

Menurut Midgley (1995), menjelaskan bahwa pembangunan sosial merupakan pendekatan pembangunan secara eksplisit berusaha mengintegrasikan proses pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi merupakan syarat bagi tercapainya pembangunan manusia karena dengan pembangunan ekonomi terjamin peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan.

Kesejahteraan dalam ekonomi konvensional berfokus pada kesejahteraan materil berdasarkan tingkat kesenangan dan kepuasan. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap sebagai ukuran peningkatan kesejahteraan. Seiring waktu terjadi perubahan konsep dalam

mendefinisikan kesejahteraan karena masalah kesejahteraan sangat kompleks sehingga diperlukan rumusan yang multidimensi baik bersifat fisik maupun non fisik.

Sen (2008:8) menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan gambaran proses rasional kearah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk memperoleh kemajuan (*unfreedom*) dengan kriteria yang lebih luas dan diharapkan dapat memberi makna lebih luas (*well-being*) yang lebih mapan diukur dengan kriteria tingkat kehidupan (*level of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*), kualitas kehidupan (*quality of live*) dan pembangunan manusia (*human development*).

Todaro dan smith (2011:27) menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik seperti peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar, peningkatan tingkat pendapatan yang lebih baik, peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan, serta memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Menurut jhingan (2006:7), kesejahteraan masyarakat cenderung dilihat dengan perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi dipandang sebagai suatu proses dimana pendapatan nasional rill per kapita naik dibarengi dengan

penurunan kesenjangan pendapatan dan pemenuhan keinginan secara keseluruhan.

Dapat diartikan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat baik secara jasmani dan rohani seperti pakaian, makanan, rumah, kesehatan dan pendidikan pada tingkat batas anggaran tertentu serta mempunyai kapabilitas untuk dapat meningkatkan standard an kualitas hidup kearah yang lebih baik.

Menurut Albert dan Hahnel (2007:77) dalam Retningtyas (2012) teori kesejahteraan menurut ekonomi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam yaitu:

1. *Classical Utilitarian*, menekan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah dan juga tingkat kepuasan setiap individu tersebut dapat dibandingkan secara kuantitatif. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya, sedangkan masyarakat lebih meningkatkan kesejahteraan kelompoknya.
2. *Neoclassical Welfare*, menekankan pada prinsip *pareto optimality*. Pareto optimal didefenisikan sebagai sebuah kondisi dimana sudah tidak mungkin lagi mengubah alokasi sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku ekonomi (*better off*) tanpa mengorbankan pelaku ekonomi yang juga.

3. *New Contraction Approach*, menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan pengaruh dari nilai pendapatan nasional yang dinyatakan dalam satuan harga / besaran nominal. Setiap waktu nilainya bisa berubah sejalan dengan perubahan jumlah produksi barang dan jasa suatu Negara dalam periode tertentu, misal pertriwulan atau tahunan. Pertumbuhan ekonomi bisa menggambarkan adanya peningkatan produksi barang atau jasa secara fisik dalam periode tertentu. Meningkatnya pendapatan nasional suatu Negara mengidentifikasi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Negara tersebut. Pertumbuhan dalam persentase dapat dihitung dengan cara sederhana, sebagai berikut (Tambunan: 2011: 67)

$$Gt = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \% \dots\dots\dots 2.1$$

Dimana:

Gt : Pertumbuhan ekonomi periode t (triwulan atau tahunan)

PDBRt : Produk Domestik Bruto Riil periode t (harga konstan)

PDBRt-1 : PDBR satu periode sebelumnya

### a. Pertumbuhan Endogen

Teori endogen memiliki perspektif yang lebih luas dari pada teori-teori pertumbuhan sebelumnya. Pada umumnya teori-teori

pertumbuhan ekonomi sebelumnya hanya menekankan pentingnya proses akumulasi modal dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya untuk memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka suatu negara membutuhkan investasi yang tinggi pula. Dana untuk membiayai investasi didapatkan dari tabungan. Oleh karena itu kunci utama dari pertumbuhan ekonomi adalah terletak pada Kemampuan suatu negara dalam mengakumulasi tabungan domestik.

Pada teori pertumbuhan endogen teknologi dianggap sebagai faktor endogen yang dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel kebijakan. Sumber pertumbuhan dalam teori endogen adalah meningkatnya stok pengetahuan dan ide baru dalam perekonomian yang mendorong tumbuhnya daya cipta, kreasi, dan inisiatif serta diwujudkan dalam kegiatan yang inovatif dan produktif. Teori endogen mampu menjelaskan potensi keuntungan dari investasi komplementer ( *complementary investment* ) dalam modal atau sumberdaya manusia, sarana prasarana infrastruktur atau kegiatan penelitian (Todaro, 2006).

Dari penjelasan di atas terlihat perbedaan antara teori pertumbuhan neoklasik dengan teori endogen. Pada teori pertumbuhan endogen peran kualitas tenaga kerja lebih penting daripada kualitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja bukan hanya dilihat dari tingkat pendidikan tetapi juga kondisi kesehatan pekerjanya.

## **b. Teori Pertumbuhan Neoklasik**

Dornbusch, Rudiger (2008: 61) menyatakan teori pertumbuhan neoklasik yang dikembangkan oleh Solo 1956 dan pengikutnya didominasi oleh pemikiran mengenai pertumbuhan pendapatan per kapita jangka panjang dan perkembangan yang semakin meningkat. Menurutnya tingkat tabungan merupakan tambahan pembiayaan terhadap stok modal nasional.

Di dalam teori pertumbuhan ekonomi dikenal dengan dua aliran pemikiran yaitu teori Neo klasik dan teori modern. pada teori neoklasik faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja dan kapital. adanya tambahan K (*capital*) & L (*labor*) dengan asumsi produktivitas masing-masing faktor produksi tetap maka akan menambah output yang dihasilkan.

Sukirno (2002) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan

karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan secara singkat adalah sebuah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan terlihat adanya aspek dinamis dalam suatu perekonomian, yaitu terlihat bagaimana perekonomian suatu negara yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Boediono, 1981: 9). Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup panjang mengalami kenaikan output per kapita. Sebaliknya jika selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut, output per kapita menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, maka penurunan ini bukan pertumbuhan ekonomi.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan

jasa yang diproduksi disuatu negara dalam kurun waktutertentu (Mankiw, 2003).

Suatu perekonomian dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika output barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa dalam perekonomian suatu negara dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai PDB ini digunakan dalam mengukur persentase pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perubahan nilai PDB dapat menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Selain PDB, dalam suatu negara juga dikenal ukuran PNB (Produk Nasional Bruto) serta Pendapatan Nasional (*National Income*). Perhitungan pertumbuhan ekonomi biasanya menggunakan data PDB triwulan dan tahunan.

**c. Pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.**

Pada tingkat makro, distribusi peningkatan pendaoatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya diarahkan lebih kemasyarakat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyrakat dalam memenuhi kebutuhan menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai

meningkat, maka ini juga akan meningkat proporsi konsumsi masyarakat sehingga tercapai lah kesejahteraan masyarakat.

### **3. Infrastruktur**

#### **a. Teori Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2002).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

##### **1). Teori Makro**

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran

pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono,1999):

1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.
3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

Dalam teori makro menurut Rostow dan Musgrave, Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap

total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi.

Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil.

## **2) Teori Mikro**

Tujuan dari teori mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Peranan pengeluaran pemerintah baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD khususnya pengeluaran untuk human capital dan

infrastruktur fisik, dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktifitas pengeluaran pemerintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya, yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi total output (PDRB) yakni melalui penyediaan infrastruktur.

Dalam kamus bahasa Indonesia infrastruktur diartikan yaitu sebagai sarana dan prasarana umum. Secara umum diketahui sebagai fasilitas publik seperti rumah sakit, jalan, jembatan, sanitasi, telepon, dsb. Dalam ilmu ekonomi infrastruktur merupakan wujud dari public capital (modal capital) yang dibentuk dari investasi yang dilakukan pemerintah (Mankiw, 2015:361). Infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen public untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan social.

Stone dalam Prasetyo (2009:225) mendefenisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dibutuhkan oleh agen-agen public untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan social. Perkembangan infrastruktur dengan

pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang erat dan saling ketergantungan satu sama lain. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang-barang, terdapatnya pengangkutan barang-barang dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas dari jasa-jasa pengangkutan tersebut. Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi, dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi terkait. Sehingga pembangunan infrastruktur dapat dianggap sebagai strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta dapat mengurangi biaya investor dalam dan luar negeri.

Infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Sarana umum dikenal juga sebagai fasilitas publik seperti jalan, listrik, jembatan, rumah sakit dan pelabuhan. Tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Menurut Todaro (2011), pertumbuhan ekonomi yang pesat akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan prasarana dan sarana sosial ekonomi. Dan permintaan terhadap pelayanan infrastruktur akan meningkat pesat seiring dengan pertumbuhan

ekonomi suatu negara. Selanjutnya World Bank (1994) membagi infrastruktur dalam tiga golongan yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi yang merupakan aset fisik dalam menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utility (telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas), public works (jalan, bendungan, saluran irigasi, dan lapangan terbang).
2. Infrastruktur sosial yang merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit, pusat kesehatan), serta untuk rekreasi (taman, museum, dan lain-lain).
3. Infrastruktur administrasi/institusi yang meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi, serta kebudayaan.

Infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem Infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang

dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Grigg dalam Kodoatie, 2003).

Menurut Kurniawan (2014) infrastruktur jalan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, kondisi permukaan jalan sangat signifikan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan di suatu wilayah. Peningkatan kualitas permukaan jalan akan mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan akhirnya mampu meningkatkan pendapatan penduduk.

#### **b. Infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi**

Pembangunan infrastruktur dapat dijadikan mobil penggerak pembangunan nasional. Keberadaan infrastruktur yang memadai akan berkontribusi pada kelancaran produksi maupun distribusi barang dan jasa yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara. Infrastruktur secara perlahan menghubungkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi melalui sektor perdagangan, hotel dan restoran dan mulai berbagi peran dengan sektor manufaktur. Selanjutnya peningkatan mobilitas masyarakat antara kota dan desa sebagai akibat semakin baiknya konektivitas juga turut menghubungkan perkotaan dengan perdesaan dalam aglomerasi kesempatan kerja yang memberikan akses pada penduduk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

#### **4. Indeks Pembangunan Manusia**

Sumberdaya manusia yang efektif adalah prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Sulistiyowati, 2011). Pemanfaatan sumber daya alam sangat tergantung oleh kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola sumber daya alam tersebut. Menurut Aloysisus (dalam Lincoln Arsyad, 2010) sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi mempengaruhi perkembangan manusia melalui tingkat pendapatan, distribusi pendapatan dalam masyarakat. Sedangkan pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan yang baik sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.

Hasil dari pembangunan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas hidup manusia. Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengukuran ini melalui pencapaian rata-rata sebuah wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia yaitu angka harapan hidup saat kelahiran, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta kemampuan daya beli. Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan

dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan HDR (*Human Development Report*).

Indeks Pembangunan Manusia, karena dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak.

Menurut Badan Pusat Statistik (2015), indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report*(HDR).

*“Yakunina (2015:767) in the economics, the human development index (HDI) is used as basic quantitative assessment of*

*human capital. The human development index (HDI) is a comprehensive index, which characterizes the level of human development in the countries and regions of this country. This index is inherent in the measurement of the country's achievement in terms of health and longevity, education and actual income of its citizens. (Gregory Mankiw, David Romer, David N. Weil, 1992) The Human Development Index is analysed in three main areas, which are estimated by other indexes that are listed below :*

- a. Life expectancy index is the main indicator of the average life expectancy in the world, in this index measures the health and longevity of citizens of the particular country.*
- b. The education index, which includes access to education, as measured by average school life expectancy of children of school age and mean years of schooling of the adult population.*
- c. The index of assessing the level of life (quality of life), it is measured by the value of the gross national income (GNI) per capita in US dollars.*

Dalam ilmu ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) digunakan sebagai dasar penilaian kuantitatif modal manusia. Indeks pembangunan manusia (HDI) merupakan indeks yang komprehensif, yang mencirikan melekat dan pengukuran prestasi Negara dalam hal kesehatan dan panjang umur, pendidikan dan realisasi pendapatan warganya. (Mankiw, dkk, 1992) indeks pembangunan manusia dianalisis dalam tiga bidang utama, yang diperkirakan oleh indeks lain yang tercantum dibawah ini:

- a. Indeks harapan hidup merupakan indikator utama dari rata-rata harapan hidup di dunia. Selain itu, indeks ini mengukur kesehatan dan umur panjang warga Negara tertentu.
- b. Indeks pendidikan, yang termasuk akses terhadap pendidikan, seperti yang diukur dengan rata-rata harapan hidup sekolah anak usia sekolah dan berarti tahun bersekolah dari populasi orang dewasa.
- c. Indeks pendapatan nasional bruto, yang merupakan metode utama menilai tingkat kehidupan (kualitas hidup), hal ini diukur dengan nilai pendapatan nasional bruto (GNI) perkapita dalam dollar AS."

Indeks pembangunan manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu Negara dalam empat hal mendasar pembangunan, yaitu lama hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir, pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf dengan konsumsi perkapita nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Indeks pembangunan manusia memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran disekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak ( diukur dari paritas daya beli atau PPP, penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang menyeluruh tentang pembangunan manusia. Misalnya, indeks pembangunan manusia tidak menyertakan indikator-indikator penting seperti misalnya ketidaksertaraan dan sulit mengukur indikator-indikator seperti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan politik. Indeks ini memberikan sudut pandang yang lebih luas untuk menilai kemajuan manusia serta meninjau hubungan yang rumit antara penghasilan dan kesejahteraan (UNDP, 2004). Rumus perhitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (X1 + X2 + X3) \dots\dots\dots 2.2$$

Dimana:

X1 : Indeks harapan hidup

X2 : Indeks pendidikan

X3 : Indeks standart hidup layak

Sebelum menghitung Indeks Pembangunan Manusia, setiap komponen dari IPM harus terlebih dahulu dihitung indeks sehingga bernilai antara 0 (terburuk) dan 1 (terbaik). Untuk memudahkan dalam menganalisis biasanya indeks ini dikalikan 100. Teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut (UNDP: 2014):

$$IPM = \sum_{i=1}^3 li \dots\dots\dots 2.3$$

Dimana:

Li ; Indeks komponen IPM ke-I, dimana I = 1,2,3

Xi : Nilai indicator komponen ke-i

Max Xi : Nilai maksimum Xi

Min Xi : Nilai minimum Xi

Indikator komposit pembangunan manusia adalah alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat pencapaian pembangunan

manusia antar wilayah dan waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menunjukkan persentase pencapaian dalam pembangunan manusia dengan memperhatikan tiga factor yaitu kelangsungan hidup, pengetahuan dan daya beli.

**Table 2.1 Nilai Maksimum dan minimum komponen Indeks Pembangunan Manusia**

| Faktor             | Komponen                     | Kondisi |          |
|--------------------|------------------------------|---------|----------|
|                    |                              | Ideal   | Terburuk |
|                    | Angka Harapan Hidup (thn)    | 85,8    | 25,0     |
| Kelangsungan Hidup | Angka Melek Huruf (%)        | 100,0   | 0,0      |
| Pengetahuan        | Rata-rata Lama Sekolah (thn) | 15      | 0        |
| Daya Beli          | Konsumsi Riil Perkapita (Rp) | 732,72  | 300      |

*Sumber: UNDP, Human Development Report 1993 dalam Mudrajat, 2006:31*

Dengan tiga ukuran pembangunan tersebut dan menerapkan suatu formula yang kompleks terhadap data 160 pada tahun 1990, ranking HDI semua Negara dibagi menjadi tiga (3) kelompok, yaitu:

- Negara dengan pembangunan manusia yang rendah (*low human development*) bila nilai HDI berkisar 0,0 hingga 0,50.
- Negara dengan pembangunan manusia yang menengah (*medium human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0.51 hingga 0,79

- c. Negara dengan pembangunan manusia tertinggi (*high human development*) bila nilai HDI berkisar antara 0,80 hingga 1,0

Dapat diambil kesimpulan bahwa Negara dengan nilai HDI dibawah 0,51 hingga 0,79 negara tersebut mulai memperhatikan pembangunan manusianya, sedangkan Negara dengan nilai HDI 0,8 berarti Negara tersebut sangat memperhatikan pembangunan manusianya (Kuncoro, 2006:31).

Konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0-100,0 dengan kategori:

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Tinggi         | : IPM lebih dari 80,0  |
| Menengah Atas  | : IPM antara 66,0-79,9 |
| Menengah Bawah | : IPM antara 50,0-65,9 |
| Rendah         | : IPM kurang dari 50,0 |

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:

- a. Indeks Harapan hidup

Indeks Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan informasi mengenai angka kelahiran dan kematian

per tahun, variabel tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup terhadap nilai maksimum dan minimumnya.

b. Indeks Hidup Layak

Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP *adjusted*. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia, BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling dominan dikonsumsi oleh

masyarakat Indonesia dan telah distandarkan agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan dengan indeks PPP (*Purchasing Power Parity*).

c. Indeks Pendidikan

Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua indikator pendidikan ini dimunculkan dengan harapan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan (cerminan angka LIT), dimana LIT merupakan proporsi penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan cerminan angka MYS merupakan gambaran terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

a. **Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan

kesehatan dan sekolah UNDP, 1996 Ramirez dkk, 1998 (Ranis, 2004). Kecendrungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan sejumlah factor yang langsung berkaitan dengan indicator pembangunan manusia diatas dipengaruhi oleh tingkat dan distribusi pendapat, tingkat pendidikan serta sejauhmana peran perempuan dalam mengontrol pengeluaran rumah tangga.

Tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ranis (2004), bahwa pertumbuhan ekonomi memberi manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makan yang lebih bergizi dan berpendidikan, terutama pada rumah tangga miskin.

Selain ditentukan oleh pendapatan perkapita penduduk, distribusi pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pada saat distribusi pendapatan buruk atau terjadi ketimpangan pendapatan menyebabkan banyak rumah tangga mengalami keterbatasan keuangan. Akibatnya mengurangi pengeluaran untuk pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang mengandung gizi baik (Ramirez. Et.al, 1998). Pengeluaran lebih banyak digunakan untuk mengkonsumsi makanan dengan asupan gizi

yang kurang dan nutrisi yang rendah (UNDP, 1996). Dengan demikian, jika terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih baik. Peningkatan pendapatan pada penduduk miskin mendorong mereka untuk membelanjakan penguasaan rumah tangganya agar dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya. Jadi peningkatan indeks pembangunan manusia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini dilihat dengan berkualitas manusia sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita masyarakat. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

**b. Indeks pembangunan manusia terhadap kesejahteraan masyarakat**

Meningkatnya indeks pembangunan manusia ini akan menyebabkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, sehingga daya saing akan semakin tinggi sehingga akan menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat, dilihat dari meningkatnya proporsi konsumsi masyarakat sehingga tercapailah kesejahteraan masyarakat.

**5. Korupsi**

**a. Teori Ekonomi Kriminal**

Korupsi berasal dari kata latin *Corruptio* atau *Corruptus* kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi. Alatas (dalam Semma, 2008:32), menerangkan esensi korupsi sebagai pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Korupsi merupakan perwujudan immoral dari dorongan untuk memperoleh sesuatu dengan metode pencurian dan penipuan. World Bank (dalam Subekti, 2013) menyatakan korupsi adalah setiap transaksi antara para pelaku dari sektor swasta dan sektor publik melalui utilitas bersama secara ilegal ditransformasikan menjadi keuntungan pribadi.

*Transparency International* (TI) mengartikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Keuntungan pribadi dimaksud bukan hanya secara individual, tetapi juga terhadap suatu partai politik, kelompok tertentu dalam masyarakat, suku, teman atau keluarga. Definisi ini menunjukkan korupsi yang terjadi pada tingkat birokrasi, dan tidak terjadi pada sektor swasta (Widiastuti, 2008).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah dorongan yang terdapat didalam diri seseorang untuk

memperoleh sesuatu yang dilakukan dengan cara pencurian dan penipuan dalam menyalahgunakan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Menurut Shah dan Shacter (dalam Setiyono, 2013), kategori korupsi meliputi tiga jenis:

1. *Grand corruption* yaitu sejumlah besar sumber daya publik yang dicuri dan disalahgunakan oleh segelintir pejabat publik.
2. *State of regulatory capture* yaitu lembaga public dengan swasta memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan kolusi.
3. *Bureaucratic or petty corruption* yaitu sejumlah besar pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. Bureaucratic or petty corruption merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa dan sering terjadi pada titik pelayanan public seperti imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, perizinan, ataupun sekolah. Sedangkan *grand corruption* dan *regulatory capture* biasanya dilakukan oleh para elite politik ataupun pejabat pemerintahan senior dalam menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional dengan cara merancang kebijakan atau perundang-undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri.

UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa, serta gratifikasi.

Korupsi pada saat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga pemerintahan daerah. Motif melakukan korupsi

secara politik yaitu untuk mendapatkan kekuasaan, sedangkan secara ekonomi untuk mendapatkan akses lebih ke sumber-sumber ekonomi untuk mendapatkan pendapatan yang lebih.

Bentuk dan motif korupsi menurut Stueckelberger (dalam Widiastuti, 2008) yaitu:

1. Korupsi kemiskinan (*corruption of poverty*) yang disebut juga sebagai korupsi kecil, yaitu korupsi yang berakar dalam kemiskinan. Contohnya apabila pegawai-pegawai pemerintah tidak mendapatkan gaji yang dapat mencukupi kehidupannya.
2. Korupsi kekuasaan (*corruption of power*) yang disebut korupsi besar, yaitu berawal dari nafsu untuk memiliki lebih banyak kekuasaan, pengaruh, dan kesejahteraan atau dalam mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki.
3. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (*corruption of procurement*) dan korupsi mempercepat urusan (*corruption of acceleration*) yaitu untuk mendapatkan barang atau jasa, tanpa korupsi maka memperolehnya tidak akan tepat waktu atau membutuhkan biaya administrasi yang lebih besar.

**b. Teori Atasan-Bawahan (principal Agent)**

Teori ini melihat relasi antara dua pihak dan tujuan serta insentif berbeda yang terjadi dalam situasi ekonomi yang tidak seimbang atau asimetris. Pihak pertama, atasan (*principal*)

memiliki tujuan akhir yang diinginkan. Untuk mencapai itu, atasan akan mendelegasikan pekerjaan ini pada bawahan (*agent*) dengan insentif identik dengan hirarki dalam perusahaan atau organisasi. Dalam konteks pemerinthan, misalnya pejabat publik dan anggota parlemen adalah bawahan sementara pemilih adalah atasan (Jensen dan Meckling, 1976)

Dalam kondisi ideal, atasan bisa memonitori penuh kerja bawahan, dan tujuan akhir yang ditetapkan atasan akan tercapai tanpa deviasi. Tapi sering kali kondisi ideal ini tidak terjadi. Biaya untuk mengawasi bawahan setiap saat akan terlalu tinggi. Sementara itu, bawahan juga memiliki sejumlah kepentingan pribadi yang ingin ia penuhi. Di sinilah ruang untuk menawarkan sejumlah imbalan pada bawahan melakukan sesuatu yang berbeda dari apa yang diinginkan atasan. Klitgaard mengatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya monopoli kekuatan (*monopoly of power*) ditambah dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang tanpa adanya kekuasaan yang memadai dari aparat pengawasan menyebabkan seseorang terdorong untuk melakukan tindakan korupsi, hal tersebut rumuskan sebagai berikut (Klitgaard: 2001)

$$C = M + D - A$$

Keterangan:

$M$  = *monopoly of power*

$D$  = *Discretion of official*

*A = Accountability*

*C = Corruption*

Menurut Jack Bologna, dkk (1993), korupsi terjadi karena hubungan empat komponen yaitu : *Greed, Opportunity, Need, Ekposes*

1. *Greed*, terkait dengan keserakahan dan ketamakan oleh para pelaku korupsi. Tipe seperti ini merupakan tipe orang yang tidak pernah puas dengan keadaan dirinya, punya impian yang berlebihan.
2. *Opportunity*, terkait dengan sistem yang memberikan kesempatan atau celah terjadinya korupsi. Sistem pengendalian yang tidak rapi, dapat menyebabkan seseorang bekerja asal-asalan. Orang gampang memanipulasi angka. Bebas berlaku curang, peluang korupsi terbuka lebar.
3. *Need*, berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, penuh sikap konsumerisme, dan selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai.
4. *Exposes*, berkaitan dengan hukuman yang rendah terhadap pelaku korupsi. Hukuman yang tidak membuat efek jera sang pelaku (*Deterrence effect*).

### c. Teori Rent Seeking

*Rent seeking* memiliki dua pendekatan. Pendekatan pertama ialah teori *rent seeking* dari prespektif ekonomi klasik dan kedua ialah teori *rent seeking* dari *perspektif* ekonomi politik. Teori *rent seeking* pertama kali diperkenalkan oleh Anne O. Krueger pada tahun 1974. Pada saat itu Krueger membahas tentang parktik untuk memperoleh kuota impor, dimana kuota impor sendiri dimaknai sebagai perbedaan antara batas harga dan harga domestic. Menurut

Little (dalam Yustika, 2012:107), perilaku pencari rente dianggap sebagai pengeluaran sumber daya untuk mengubah kebijakan ekonomi, atau menikung kebijakan tersebut agar dapat menguntungkan bagi para pencari rente. Dalam pandangan ekonomi klasik, pemburuan rente dimaknai secara netral, atau tidak memberikan dampak negative terhadap perekonomian atau memberikan keuntungan dan dampak positif. Hal ini dimaknai netral karena pendapatan yang dimaksudkan yaitu pendapatan dari *rent seeking* ini sama dengan pendapatan yang diperoleh individu karena menanamkan modalnya atau menjual jasa dan tenaganya.

Sedangkan dalam pandangan ekonomi politik, *rent seeking* dimaknai negatif. Secara sederhana, korupsi telah dianggap sebagai salah satu bentuk pemburuan rente (*rent seeking*). Hal dipandang sebagai sarana khusus oleh pihak swasta maupun pemerintah yang berusaha untuk mengejar kepentingan dalam kompetisi untuk perlakuan istimewa (Deliarnov, 2006: 57)

Dalam makna korupsi yang mencakup pemburuan rente ekonomi maka dapat dipahami bahwa korupsi yang meningkat akan menyebabkan suatu Negara menggunakan sumberdaya alam secara maksimal yang berakibat pada turunnya pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Yustika (2012:107) mengatakan bahwa asumsi awal yang dibangun dari teori ekonomi politik ialah kelompok kepentingan

ingin memaksimalkan keuntungan atau profit sebesar mungkin dengan meminimalkan upaya mereka untuk mencapai keuntungan besar tersebut. Pada saat ini, sumberdaya ekonomi politik, seperti lobi akan dipakai untuk menanggapi keuntungan tersebut. Lobi-lobi tersebut akan membuat pemerintahan menjadi lambat dalam mengambil atau memutuskan suatu kebijakan.

Semakin besarnya perluasan pemerintah menentukan alokasi kesejahteraan, maka semakin besar kesempatan bagi munculnya para pemburu rente. Aktor yang terlibat dalam pemburu rente ialah dari pihak kelompok bisnis ataupun individu dan juga pihak yang berkaitan dengan pemerintah. Melihat pada era orde baru dimana suatu kedekatan antara penguasa dengan pemerintah, sehingga mudahnya perusahaan untuk berkembang pesat. Dalam hal ini perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi dan dapat mencegah pesaing untuk masuk ke pasar. Ada 3 penjelasan mengenai rent seeking behavior. Pertama masyarakat akan mengalokasikan sumber daya untuk menangkap peluang hak milik yang ditawarkan oleh pemerintah. pada titik ini munculnya perilaku mencari rente sangat besar. Kedua setiap kelompok atau individu pasti akan berupaya mempertahankan posisi mereka yang menguntungkan implikasi, keseimbangan ekonomi tidak akan dapat tercapai dalam jangka panjang karena adanya kelompok-kelompok pendekatan yang mencoba mendapatkan fasilitas.

Ketiga dalam pemerintahan sendiri terdapat kepentingan-kepentingan yang berbeda. Dengan kata lain kepentingan pemerintah tidaklah tunggal.

Dalam kajian ekonomi politik menurut deliarnov (2006: 57) laba yang diterima pengusaha melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi juga disebut rente. Kegiatan ingin mendapatkan imbalan atau rente itu sendiri disebut dengan kalap rente atau rent seeking behavior. Sering kita menganggap bahwa pemerintah membuat suatu kebijakan untuk kepentingan rakyat, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di di pasar ataupun untuk membuat suatu kestabilan negara. Tetapi kebanyakan kebijakan justru menjadi suatu alat untuk kepentingan kelompok kelompok penekan deliarnov.

#### **d. Korupsi terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Semakin tingginya kecurangan yang terjadi maka akan menyebabkan berkurangnya fasilitas yang akan diberikan kepada masyarakat sehingga tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan Negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu Negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu Negara.

Tindakan korupsi akan menghambat jalannya kegiatan perekonomian disuatu Negara, karena pelaku ekonomi akan merasa dirugikan dan enggan melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga akan berdampak pada perkembangan ekonomi suatu Negara dan menimbulkan banyak permasalahan disektor perekonomian diantaranya penurunan produktivitas, menurunnya tingkat pendapatan suatu negara dan lambatnya pertumbuhan ekonomi.

## **B. Penelitian Relevan**

- a. Saputri (2018) dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Prasetyo (2018) dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh komponen dari IPM yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan, indeks paritas daya beli terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel indeks kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel indeks pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel paritas daya beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

- c. Naibaho (2018) dalam penelitian ini untuk mengetahui dampak korupsi, pajak dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh negative namun tidak signifikan antara korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapat pengaruh signifikan dan negative antara pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terdapat pengaruh yang signifikan antara korupsi, pajak, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- d. Rachmadani (2017) dalam penelitian dampak dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN. Hasil penelitian ini menunjukkan variable korupsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variable investasi asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN.
- e. Sholihah (2017) dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

- f. Rakhmawati (2016) dalam penelitian ini untuk menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia, tenaga kerja, dan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan dan variabel tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan.
- g. Wibowo (2016), dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan, listrik, kesehatan, dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa infrastruktur ekonomi dan sosial berpengaruh positif dari setiap variabel yang signifikan yaitu variabel listrik, kesehatan dan pendidikan, namun tidak berpengaruh signifikan bagi infrastruktur panjang jalan.
- h. Winanda (2016), dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah panjang jalan, jumlah energi listrik yang terjual, jumlah volume air bersih terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan Infrastruktur jalan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara infrastruktur energi listrik dan air bersih berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Juga diketahui berdasarkan hasil analisis data bahwa variabel yang memiliki pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur energi listrik. Infrastruktur air bersih memiliki pengaruh besar ke dua setelah energi listrik dan terakhir adalah infrastruktur panjang jalan yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

- i. Hapsari (2011), dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jalan, listrik, telepon dan air terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan dari keempat variabel (jalan, listrik, telepon, dan air), variabel jalan dan listrik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan telepon dan air tidak mempunyai pengaruh yang signifikan.

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan, dan menentukan persepsi keterkaitan antara variabel – variabel yang akan diteliti berdasarkan permasalahan maupun antara variabel yang diteliti berpijak dari kajian teori yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang-barang, terdapatnya pengangkutan barang-barang dengan kecepatan yang lebih tinggi, dan perbaikan kualitas dari jasa-jasa pengangkutan tersebut. Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur akan menciptakan lapangan kerja sektor konstruksi, dalam jangka menengah dan panjang akan mendukung peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor-sektor ekonomi terkait. Maka hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga terwujudlah kesejahteraan masyarakat.

Indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketika IPM meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat dan sebaliknya. Apabila indeks pembangunan manusia terpenuhi maka akan memberikan semangat tinggi kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. ketika sudah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Korupsi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketika korupsi meningkat maka akan banyak merugikan terhadap masyarakat baik itu dari segi sarana dan prasarana, maupun pelayanan-pelayanan bagi masyarakat, sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkurang nya pendapatan perkapita ataupun daya belinya terhadap kebutuhan pokoknya.

Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi didorong dengan peningkatan kapasitas produksi maka akan mempengaruhi jumlah produk barang dan jasa sehingga membuka kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan..

Jadi pengaruh infrastruktur dan pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta korupsi berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, dan

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih jelas bagaimana hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan pada skema berikut ini:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual indeks pembangunan manusia dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia**

#### **D. Hipotesis Penelitian**

1. Infrastruktur berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

2. Pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

3. Pembangunan manusia berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Korupsi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

pendapatan masyarakat. Dengan terjadinya peningkatan pendapatan, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjadi lebih baik.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Sepriani (2017) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat, ketika pertumbuhan ekonomi menurun maka kesejahteraan masyarakat menurun dengan asumsi *ceteris paribus*.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil olahan data dengan menggunakan analisis indirect least square (model persamaan simultan) dan pembahasan terhadap hasil penelitian

antara variabel bebas yaitu infrastruktur, indeks pembangunan manusia dan korupsi terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat baik secara parsial maupun bersama-sama, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Infrastruktur berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan infrastruktur tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena infrastruktur hanya salah satu faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi.
2. Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia maka akan mempengaruhi terhadap kualitas manusia sehingga akan mampu mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi.
3. Indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena meningkatnya indeks pembangunan manusia akan menyebabkan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia, sehingga daya saing akan

semakin tinggi sehingga akan menyebabkan meningkatnya pendapatan masyarakat, dilihat dari meningkatnya proporsi pengeluaran masyarakat sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

4. Korupsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan korupsi tidak akan berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat disebabkan karena pengambilan data untuk korupsi menggunakan jumlah pengaduan kasus korupsi antar provinsi dari tahun 2014-2018.
5. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Hal ini menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan menjadi lebih baik sehingga akan menghantarkan kepada kesejahteraan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian dan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya serta dari hasil penelitian ini dan kesimpulan yang diperoleh maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perbaiki infrastruktur sampai ke seluruh daerah Indonesia hingga ke lorong-lorong jalan sehingga sampai ke daerah terbelakang, terluar dan

terjauh. Untuk itu pemerintah harus lebih jeli dalam menentukan kebijakan fiskal sehingga dapat terjadi pertumbuhan infrastruktur jalan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

2. Lebih meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan memperbagus pendidikan, kesehatan dan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di semua sektor, karena dampaknya dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja di semua sektor. Strategi pembangunan yang mengedepankan kualitas SDM sebaiknya dijadikan salah satu strategi pembangunan daerah di Indonesia. Karena dampaknya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus dapat menciptakan pemerataan pendapatan sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
4. Pemerintah harus bekerja keras untuk memberantas korupsi. Karena korupsi sudah menjadi budaya, makanya penegakan hukum tidak bisa ditawar lagi., jika memang pemerintah betul-betul mempunyai keinginan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Disamping itu data yang digunakan dalam penelitian ini terbatas, sehingga jika nanti data IPK (CPI) tahunan di setiap provinsi maka hasilnya diharapkan akan lebih menverminkan kondisi yang sebenarnya dari masing-masing provinsi.
5. Untuk menciptakan kesejahteraan maka harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah lebih memperhatikan faktor-faktor pendukung

pertumbuhan ekonomi seperti infrastruktur dan indeks pembangunan manusia..

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Awandari, Luh Putu Putridan I Gst Bgs Indrajaya. 2016. *Pengaruh Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 5 No. 12, tahun 2016. Universitas Udayana